

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KECURANGAN AKUNTANSI**

(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Kebumen)

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Edo Anantya Sunarto
16.0102.0105

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecurangan akuntansi sudah sering terjadi di Indonesia baik pada lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, dimana hal tersebut telah menarik perhatian berbagai media di dalam negeri maupun luar negeri. Kecurangan akuntansi merupakan suatu tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merugikan orang lain. Pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan *Good Governance* diperlukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkualitas dan berkompeten. OPD merupakan instansi pada pemerintahan daerah yang menerima dan menggunakan anggaran untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Dan et al. (2009), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah satu yang menimbulkan kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu menimbulkan transaksi negatif atau dengan sengaja menghapus penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan seperti penyalahgunaan atau penggelapan dengan tujuan menipu pemakai eksternal laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat penting sebagai bahan dasar pengambilan keputusan, laporan keuangan memuat segala informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya yaitu *stakeholders*, dan laporan keuangan harus disusun

sebaik mungkin sesuai dengan data yang akurat dan sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku (Dewi & Ratnadi, 2017).

Banyaknya kasus kecurangan diakibatkan karena tidak adanya sistem pengendalian internal sehingga lemahnya pengawasan atau kontrol, tidak adanya aturan dalam akuntansi, tidak etisnya perilaku, tidak adanya kejujuran, peraturan dan kinerja kerja lemah sehingga para pembuat kejahatan leluasa dapat melakukan aksinya (Tunggal, 2018) Selain itu kecurangan juga bisa berhubungan dengan karakter manusia itu sendiri. Karakter manusia dapat dilihat dari kepribadian dan pola pikir mereka yang menyarankan bahwa kejujuran dan keadilan itu sangatlah penting dan tidak boleh dihilangkan dan harus ditingkatkan dan dipertahankan agar bisa memondasi diri kita sendiri untuk tidak melakukan kecurangan.

ACFE (2020), Kecurangan yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan maupun swasta adalah *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *fraudulent statement* (kecurangan laporan keuangan), dan *corruption* (korupsi). Kecurangan akuntansi tersebut dapat merugikan suatu negara. Kecurangan akuntansi biasanya terjadi karena adanya salah saji dalam laporan keuangan sehingga dapat merugikan suatu pengguna laporan keuangan. Penyalahgunaan aset merupakan tindakan seseorang yang di sengaja dalam Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan kelompok, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. UU No.254 Tahun 1960 korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau

kedudukan. Korupsi dapat berdampak pada kerugian keuangan suatu negara, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi, kriminalitas yang semakin naik, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

Kecurangan akuntansi dipengaruhi oleh tingkat korupsi suatu negara. Kasus korupsi yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (2018) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dikutip dari www.antikorupsi.org tanggal 20 Februari 2018 mencatat, pada tahun 2017 terdapat 576 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar. Jumlah tersangkanya mencapai 1.298 orang. Berdasarkan rilis ICW, Selasa (20/2/2018), jika dibandingkan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terutama pada aspek kerugian negara. Pada 2016, kerugian negara dari 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun. Angka ini naik menjadi Rp 6,5 triliun pada tahun 2017. Ada sejumlah modus yang paling banyak digunakan dalam tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2017. Modus korupsi yang paling banyak digunakan dalam kasus korupsi tahun 2017 adalah penyalahgunaan anggaran. Ada 154 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun dengan modus ini. Modus lainnya, penggelembungan harga (mark up) dan pungutan liar dengan masing-masing sebanyak 77 kasus dan 71 kasus. ICW menyebutkan, lembaga yang tercatat paling banyak terjadinya korupsi adalah pemerintah kabupaten dengan 222 kasus dan kerugian negara Rp 1,17 triliun. Pemerintah kota dengan jumlah 45 kasus serta kerugian negara Rp 159 miliar.

Kasus kecurangan di OPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan (BPK) yang menemukan tindak pidana korupsi pada salah satu Dinas di Kabupaten Kebumen pada periode 2017/2018

yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp.2,5 miliar (www.bpkjateng.go.id). Tindakan korupsi memerlukan Sistem monitoring yang baik untuk menanggulangi tindak kecurangan yang terjadi, untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik maka diperlukan pengendalian internal. Pengendalian internal memegang peranan penting pada organisasi untuk meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan (Fauwzi, M.G, n.d., 2011).

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal mempunyai fungsi untuk pengawasan, pengarahan, mengukur suatu sumberdaya pada organisasi, mencegah dan mendeteksi penggelapan, melindungi sumberdaya organisasi yang berwujud (mesin dan lahan), maupun yang tidak berwujud (reputasi, hak kekayaan intelektual, hak dagang). Pada tingkatan organisasi tujuan pengendalian internal berkaitan dengan keandalan laporan keuangan, umpan balik yang tepat waktu terhadap tujuan-tujuan oprasional dan strategis, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Pengendalian internal dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya, menyediakan informasi bagaimana menilai suatu kinerja dan menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Downida, 2017) dan (Dewi & Ratnadi, 2017) menyatakan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kecurangan akuntansi.

Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda dari Tarigan (2016); Zelmiyanti & Anita (2015) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan yang lain yaitu ketaatan pada aturan akuntansi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) aturan didefinisikan sebagai cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut dan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Demikian pula dalam suatu organisasi pasti terdapat banyak aturan yang telah ditetapkan salah satunya adalah aturan akuntansi. Sedangkan menurut (Downida, 2017). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai “proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu entitas”. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada entitas pemerintah khususnya terdapat standart akuntansi pemerintah (SAP) yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsipprinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah, berdasarkan pada PP nomer 71 tahun 2010.

PP nomor 71 tahun 2010 menjelaskan tentang standar akuntansi pemerintah Pada entitas pemerintah khususnya yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan prinsip prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan ditaati dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi pemerintah. Ketaatan adalah suatu sikap patuh kepada aturan atau perintah, sedangkan aturan adalah cara atau tindakan yang telah ditetapkan yang harus dijalankan dan dituruti. PP RI No. 24 tahun 2005 menjelaskan tentang Standar akuntansi

keuangan adalah aturan yang digunakan dalam kegiatan akuntansi, sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam SAP.

Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang dihasilkan efektif handal serta akurat informasinya, aturan akuntansi dapat menghindarkan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. BPK mengungkapkan permasalahan ketidak hematatan, ketidak efisienan dan ketidak efektifan senilai Rp 2,25 triliun (www.bpk.go.id). Laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecurangan akuntansi di mana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusuri setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi. (Downida, 2017) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan, hasil penelitian yang berbeda dari (Rodiah et al., 2019) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

(Asshidiqie, 2009) Penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

perundangundangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Kecurangan adalah bentuk tindakan melawan hukum yang berakibat pada kerugian bagi negara. penegakan hukum diharapkan mampu mengurangi tingkat kecurangan yang terjadi dalam organisasi, penegakan hukum berfungsi sebagai dasar atau pedoman yang digunakan di berkehidupan bernegara dan bermasyarakat, hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normative yang mengikat dan mengatur kehidupan, penegakan hukum menyangkut penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum berfungsi sebagai alat kontrol pada organisasi. Semakin tinggi penegakan hukum yang ada pada organisasi pemerintahan maka akan menimbulkan semakin rendah tingkat korupsi dan tindakan kecurangan yang terjadi.

Faktor faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan yang lain yaitu perilaku tidak etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk (Ebert, 2006). Perilaku tidak etis berkaitan dengan etika dalam berorganisasi, perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial, agama, hukum adat istiadat yang diterima secara umum yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang sangat membahayakan. Contoh perilaku yang tidak etis pada organisasi pemerintahan adalah tidak mengikuti peraturan yang berlaku, tindakan menyalah gunakan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, dan tindakan yang berhubungan dengan merugikan negara. BPK mengungkapkan sebanyak 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang merugikan negara sebesar Rp25,14 triliun(www.bpk.go.id).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan yang lain yaitu asimetri informasi. Teori keagenan memprediksi jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal yang menunjukkan kepentingan kedua belah pihak berbeda, maka agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan principal (Gudono, 2012). Asimetri informasi dapat menimbulkan tindakan kekacauan moral (*moral hazard*) dan pilihan yang merugikan (*adverse selection*). Asimetri informasi adalah situasi ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak (*agent* dan *principals*) dan sebagai akibatnya konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut (Breda, 2002). Semakin tinggi asimetri informasi yang dimiliki oleh satu pihak maka semakin besar kesempatan pihak tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan, kecurangan tersebut bisa dilakukan dengan penghilangan dokumen, *mark up* harga maupun tindakan manipulasi laporan keuangan. Downida (2017) menyatakan bahwa asimetris informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Setiawan, dkk (2015) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan adalah sistem kompensasi. Mulyadi (2002) mengungkapkan sistem kompensasi yang tepat mampu memotivasi karyawan untuk berbuat baik. Agarwal (2001), kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan pada suatu organisasi. Kompensasi dapat berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung, diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi.. Pemberian kompensasi mampu memberikan motivasi,

semangat, dan kepuasan organisasi perangkat daerah dalam bekerja, sehingga menimbulkan dorongan untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik daripada dengan minimnya kompensasi yang diberikan, kesesuaian kompensasi juga dapat meminimalkan tindakan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi, karena kesejahteraan diperhatikan dengan baik. Apabila nilai kompensasi yang diberikan lebih rendah daripada kebutuhan hidup layak maka hal itu dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang mengacu pada tindakan kecurangan, semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Yuliani & Rahistiana, 2018), dengan menggunakan persamaan keseluruhan variabel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu: **Pertama**, penambahan variabel kesesuaian kompensasi. Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non- finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Kompensasi yang sesuai mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi, semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi maka akan berdampak semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi (Gayatri et al., 2017). Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintah termasuk melakukan kecurangan akuntansi. Kompensasi tersebut bertujuan agar pegawai dapat bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak melakukan tindakan menyimpang seperti adanya

perilaku tidak etis. Tindakan menyimpang diharapkan dapat berkurang dengan adanya sistem kompensasi yang diberikan. **Kedua**, perbedaan penelitian terkait masalah waktu dan tempat penelitian untuk memperoleh bukti konsistensi hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengambil studi empiris pada OPD di Kabupaten karena terdapat kasus yang berhubungan dengan kecurangan akuntansi di Kabupaten dari hasil pemeriksaan badan pengawas keuangan (BPK) yang menemukan tindak pidana korupsi pada salah satu Dinas di Kabupaten Kebumen pada periode 2017/2018 yang mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp.2,5 miliar (www.bpkjateng.go.id).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah ketaatan pada aturan akuntansi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah penegakan hukum berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
6. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketaatan pada aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh penegakan hukum terhadap kecurangan akuntansi.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaan Teori

1. *Fraud Triangle* (Segitiga Kecurangan)

Teori *Fraud Triangle* (Cressey, 1953) menjelaskan ada 3 hal yang mendorong terjadinya sebuah upaya *fraud* atau kecurangan, yaitu *pressure* (dorongan), *opportunity* (peluang), dan *rationalization* (rasionalisasi), sebagaimana tergambar berikut ini:

- a. Dorongan, *Pressure* adalah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, contohnya hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup mewah, ketergantungan narkoba, dll. Pada umumnya yang mendorong terjadinya *fraud* adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan.
- b. Kesempatan, *Opportunity* adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi. Biasanya disebabkan karena internal control suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang. Di antara 3 elemen *fraud triangle*, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan control dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.
- c. Rasionalisasi, Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran atas tindakannya, misalnya:

d. Bahwasanya tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, Masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah dia dapatkan sekarang (posisi, gaji, promosi, dll.), Perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut.

Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Fraud adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan. Seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan biasanya dipengaruhi oleh tekanan seperti gaya hidup, kebutuhan ekonomi, tekanan gaji yang kurang sesuai. Selain itu tindakan kecurangan juga dipengaruhi adanya peluang, peluang dilihat dari sistem pengendalian internal yang lemah, bisa melakukan kong kalikong dengan teman dalam hal kecurangan. Yang terakhir orang yang melakukan tindakan kecurangan biasanya akan cenderung melakukan tindakan pembenaran terhadap apa yang telah dilakukannya.

2. Kecurangan Akuntansi

Febrianto (2017), kecurangan merupakan suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan, dan mencuri. Penggelapan disini dimaksudkan adalah dengan mengubah kekayaan atau aset yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang dapat merugikan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, atau sekelompok individu yang berakibat merugikan organisasi.

3. Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Arens, A et al., (2011), Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar. Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Mulyadi (2002), menyatakan bahwasanya pengendalian internal adalah sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan adanya pengendalian yang efektif, maka dapat dipastikan bahwa tingkat terjadinya kecurangan akuntansi dapat dikurangi

b. Komponen Pengendalian Internal

Standar Akuntansi No. 78 (SAS 78) pengendalian internal terdiri atas lima komponen yang sesuai dengan rekomendasi *Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO) yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan, serta aktivitas pengendalian.

c. Tujuan Pengendalian Internal

Arens, A et al., (2008), menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif yaitu:

1) Akuntabilitas pelaporan keuangan.

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Organisasi memikul tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan

persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

2) Efisiensi dan efektivitas operasi.

Pengendalian dalam organisasi akan mendorong pemakai sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan nonkeuangan untuk keperluan pengambilan keputusan.

3) Ketaatan pada hukum dan peraturan

Semua organisasi publik diharuskan mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

4. Ketaatan Aturan Akuntansi

Rahmawati (2012), aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Aturan akuntansi dibuat sedemikian rupa sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh IAI. Informasi yang tersedia dilaporan keuangan sangat dibutuhkan bagi investor dan manajemen jadi harus dapat diandalkan.

Sehingga dibutuhkan suatu aturan untuk menjaga keandalan informasi tersebut dan menghindari tindakan yang dapat merugikan perusahaan atau organisasi.

5. Penegakan Hukum

Asshidiqie (2009) mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang mengikat dan mengatur dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kecurangan, sehingga penting hukum ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari.

6. Perilaku Tidak Etis

Velasquez (2005) etika berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua makna, yaitu :

- a. Ethos (tunggal) atau ta etha (jamak) yang berarti kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik,

baik pada diri sendiri maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.

- b. Etika dalam pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam masyarakat.

Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara bisnis berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya.

7. Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya. Menurut Rahmawati (2012) Asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan akuntansi

dan biasanya dapat terjadi pada saat proses penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Bila terjadi asimetri informasi, maka kesempatan untuk melakukan manipulasi laporan keuangan akan semakin besar.

a. Bentuk Asimetri Informasi

- 1) Asimetri informasi vertikal, yaitu informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah (bawahan) ke tingkat yang lebih tinggi (atasan). Setiap bawahan dapat mempunyai alasan yang baik dengan meminta atau memberi informasi kepada atasan.
- 2) Asimetri informasi horizontal, yaitu informasi yang mengalir dari orang-orang dan jabatan yang sama tingkat otoritasnya atau informasi yang bergerak diantara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan antara satu dengan yang lainnya dan mereka menempati bidang fungsionalnya yang berbeda dalam organisasi namun dalam level yang sama.

b. Tipe Asimetri Informasi

Menurut Mathis & Jackson (2006) ada dua tipe asimetri informasi yaitu:

- 1) *Adverse selection* adalah sejenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangusungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* dapat terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih

mengetahui kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para investor.

- 2) *Moral hazard* adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak. *Moral hazard* dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

8. Kesesuaian Kompensasi

a. Pengertian Kompensasi

Rivai (2010), mengemukakan bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan/organisasi. Agarwal (2001), kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja. Mathis & Jackson (2006), Kompensasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang yang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi daripada di organisasi yang lain. Downida (2017),

Kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, finansial maupun non-finansial yang adil dan layak kepada karyawan atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan pada organisasi. Kompensasi harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikan kepada organisasi/perusahaan agar karyawan merasa dihargai.

b. Macam-macam Kompensasi

Rivai (2010), Kompensasi terbagi menjadi dua yaitu:

1) Kompensasi Finansial

Kompensasi finansial terdiri atas dua yaitu:

- a) Kompensasi langsung (gaji dan upah), pembayaran prestasi, pembayaran insentif, komisi, bonus, bagian keuntungan, opsi saham, dan pembayaran tertangguh yang meliputi tabungan hari tua, saham komulatif).
- b) Kompensasi tidak langsung (tunjangan) asuransi, pesangon, sekolah anak, dan pensiun. Kompensasi di luar jam kerja meliputi lembur, hari besar, cuti sakit, dan cuti hamil, sedangkan berdasarkan fasilitas meliputi rumah, biaya pindah, dan

kendaraan.

2) Kompensasi Nonfinansial

Kompensasi non finansial meliputi jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa.

c. Tujuan Kompensasi

Rivai (2010) tujuan Kompensasi yaitu :

- 1) Memperoleh SDM yang berkualitas yang tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik kepada para pelamar. Tingkat pembayaran harus responsif terhadap penawaran dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk mendapatkan karyawan yang diharapkan.
 - a) Mempertahankan karyawan yang ada Para karyawan dapat saja keluar jika besaran Kompensasi tidak kompetitif dan akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi.
 - b) Menjamin keadilan Manajemen Kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Keadilan internal mensyaratkan bahwa pembayaran dikaitkan dengan nilai relatif sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar kerja.

c) Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Pemberian Kompensasi adalah untuk membuat karyawan berperilaku seperti keinginan perusahaan dimasa depan, seperti tanggung jawab, ketaatan, dan perilaku-perilaku lainnya.

d) Mengendalikan biaya

Sistem Kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa manajemen Kompensasi efektif, bisa jadi pekerja diayar dibawah atau diatas standar.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil
1	Yuliani & Rahistiana (2018)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi	Pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Penegakan hukum dan perilaku tidak etis tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2	Harry Krishna Mulia et al. (2017)	Pengaruh pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil
3	Rodiah et al. (2019)	Pengaruh pengendalian internal ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen dan budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi	Pengendalian internal, Ketaatan aturan akuntansi dan budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Moralitas Manajemen Tidak berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
4	Novikasari et al. (2016)	Pengaruh moralitas individu, pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan Akuntansi	Moralitas Individu berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.
5	Downida (2017)	Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi	Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi
6	Dewi & Ratnadi (2017)	Pengaruh pengendalian internal dan integritas terhadap kecurangan akuntansi	Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Integritas berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.
7	Komang & Lestari (2017)	Pengaruh pengendalian internal, integritas, asimetri informasi dan kapabilitas pada kecurangan akuntansi	Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil
			Integritas negatif berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.
			Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.
			Kapabilitas positif berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan akuntansi

Arens, A et al., (2011), Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan manajemen. Pengendalian internal yang kuat akan mampu menurunkan tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi, jika pengendalian internalnya lemah maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin besar.

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) Pengendalian Internal dapat memberikan Pressure (Tekanan) Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan pencapaian tujuan. Pengendalian internal yang baik dalam suatu OPD diharapkan dapat mengurangi penyebab terjadinya tindakan kecurangan akuntansi. Salah satu contoh tindakan menyimpang dalam organisasi yaitu tindakan kecurangan akuntansi.

Penelitian Muhammad & Ridwan (2017) menunjukkan jika pengendalian internal semakin baik dalam suatu instansi maka semakin sedikit kecurangan akuntansinya. Pengendalian internal berpengaruh negatif

terhadap kecurangan akuntansi. Hasil penelitian Yuliani & Rahistiana (2018) pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Downida (2017) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Semakin Tinggi Pengendalian Internal pada sebuah organisasi maka semakin rendah tingkat kecurangan akuntansi yang terjadi dalam suatu organisasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diturunknkan hipotesis sebagai berikut:

H1. Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

2. Pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi

Zhu et al (2019), Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, handal serta akurat informasinya.

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) menjelaskan Ketaatan pada aturan akuntansi akan memberikan tekanan kepada para pelaku kecurangan. Adanya aturan akuntansi tersebut menghindari tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan organisasi. Taatnya manajemen pada aturan akuntansi yang berlaku dalam melakukan kegiatan-kegiatan akuntansi diharapkan dapat mengurangi

perilaku tidak etis. menyatakan bahwa standar akuntansi disusun untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi tersebut terdiri atas pedoman-pedoman yang digunakan untuk mengukur dan menyajikan laporan keuangan. standar akuntansi yang digunakan dalam pemerintahan disebut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Yuliani & Rahistiana (2018) ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Downida (2017) menyatakan bahwa Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Yuliani & Rahistiana (2018) dan (Rodiah et al., 2019) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Semakin tinggi ketaatan aturan akuntansi pada suatu organisasi maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang terjadi. Sehingga hipotesis yang dapat diturunkan pada penelitian ini adalah.

H2. Ketaatan aturan akuntansi negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

3. Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecurangan Akuntansi

Asshidiqie (2009) mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum dapat dianggap sebagai perangkat kaedah normatif yang

mengikat dan mengatur segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kecurangan, sehingga penting hukum ditegakkan agar kecurangan dapat dihindari.

Teori *fraud triangle* menjelaskan Hukum berfungsi sebagai tekanan dalam karyawan organisasi agar tidak melakukan tindakan kecurangan. Penegakan hukum dapat memberikan pengendalian pada organisasi, dengan adanya penegakan hukum maka tindakan kecurangan akan berkurang, jika penegakan hukum tinggi maka kecurangan akan menurun.

Rizky & Fitri (2017), menunjukkan bahwa hubungan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan Didi & Kusuma (2018), menyebutkan bahwa penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Semakin tinggi penegakan hukum maka semakin rendah kecurangan yang akan terjadi dalam sebuah organisasi.

H3. Penegakan Hukum Berpengaruh Negatif Terhadap Kecurangan Akuntansi

4. Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi

Velasquez (2005) etika berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua makna, yaitu: Ethos (tunggal) atau ta etha (jamak) yang berarti kebiasaan dan adat istiadat. Pengertian ini berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik

pada diri sendiri maupun suatu masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika pengertian kedua ini dipahami sebagai filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis, melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul di masyarakat. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial yang menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku etis dan perilaku tidak etis. Etika mempengaruhi perilaku pribadi di lingkungan kerja, tanggung jawab sosial adalah sebuah konsep yang berhubungan, namun merujuk pada seluruh cara organisasi berupaya menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan pribadi dalam lingkungan sosialnya.

Teori *fraud triangle* menjelaskan perilaku tidak etis akan memberikan adanya peluang seorang pemimpin maupun orang yang diberikan wewenang untuk melakukan tindakan kecurangan. Secara singkat seorang pimpinan organisasi harus bisa memberikan keyakinan dan contoh kepada pegawai agar bertindak sesuai norma-norma yang berlaku agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dewi & Ratnadi (2017), Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangann akuntansi. Adelin, (2013) menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Semakin tinggi perilaku tidak etis yang berada dalam sebuah organisasi maka akan berdampak semakin tinggi pula kecurangan akuntansi yang akan terjadi pada organisasi tersebut.

H4. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi

5. Pengaruh asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi

Menurut (Najahningrum, 2013) menyatakan apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Wilopo, 2006).

Teori Fraud Triangle (Cressey, 1953) asimetri informasi memberikan peluang atau kesempatan seseorang dalam berbuat curang. Sehingga, asimetri informasi membuat manajemen bertindak tidak etis dengan memberikan informasi lebih kepada pimpinan untuk kepentingan pribadi. Apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan.

Yuliani & Rahistiana (2018), asimetri informasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Downida (2017), menunjukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Semakin tinggi asimetri informasi yang ada dalam sebuah organisasi maka semakin tinggi pula tingkat kecurangan akuntansi yang akan terjadi.

H5. Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.

6. Pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi

Rivai, Veithzal (2010), mengemukakan bahwa Kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan/organisasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi tempat ia bekerja (Argawal, 2001). Kompensasi merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang yang memilih untuk bekerja di sebuah organisasi daripada di organisasi yang lain (Mathis & Jackson, 2006).

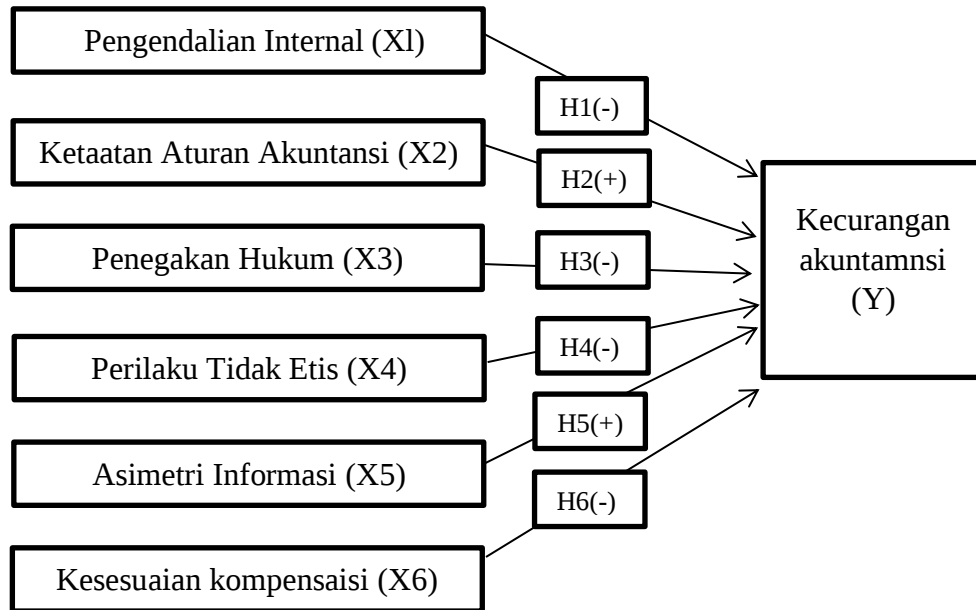
Berdasarkan teori *fraud triangle* menjelaskan adanya dorongan seseorang pegawai terhadap pemberian kompensasi yang tidak sesuai untuk melakukan kecurangan. Seseorang cenderung akan melakukan suatu hal untuk mendapatkan kompensasi yang lebih. Kompensasi merupakan hal yang berpengaruh terhadap tindakan maupun perilaku seseorang di Organisasi. Seseorang cenderung berperilaku tidak etis untuk memaksimalkan keuntungan pribadinya. Pimpinana akan menjadi tolok ukur seorang pegawai

dalam melakukan tindakan. Kecurangan yang dilakukan seseorang disebabkan oleh keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Tindakan tersebut tidak lain didorong oleh ketidakpuasan individu atas imbalan yang mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sistem kompensasi yang sesuai diharapkan dapat membuat individu merasa tercukupi sehingga individu tidak melakukan tindakan yang merugikan instansi atau pemerintah termasuk melakukan kecurangan akuntansi. Kompensasi tersebut bertujuan agar pegawai dapat bertindak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak melakukan tindakan menyimpang seperti adanya perilaku tidak etis. Tindakan menyimpang diharapkan dapat berkurang dengan adanya sistem kompensasi yang diberikan.

Gayatri et al. (2017) bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi. Zainal, (2013) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecurangan akuntansi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Semakin tinggi kompensasi yang diberikan oleh suatu organisasi maka semakin rendah tingkat kecurangan yang akan terjadi pada organisasi tersebut.

H6. Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.

D. Kerangka Pikir



Gambar 1
kerangka Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro, Nur, 1999). Berdasarkan karakteristik masalah penelitian maka diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta saat ini dari suatu populasi.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi menurut (Sugiyono, 2012) adalah wilayah umum yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada OPD Kabupaten Kebumen.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai sifat yang sama (Sukandamurnidi, 2006). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria yang digunakan dalam adalah:

- a. Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran
- b. Pegawai atau staf bagian keuangan yang dianggap memahami tentang akuntansi
- c. bendahara penerimaan dan pengeluaran karena memahami masalah akuntansi dan terlibat kegiatan yang berkaitan dengan keuangan OPD
- d. Bekerja minimal 1 tahun pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan alasan karena dipandang telah memiliki pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang ada di dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta terlibat dalam pengambilan keputusan memiliki pengetahuan tentang arus kas keuangan.

C. Data Penelitian

1. Jenis dan sumber data

Penelitian ini adalah penelitian primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data tersebut diperoleh secara langsung dari responden pada OPD di Kabupaten Kebumen

2. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuesioner. Dalam pengukurannya, setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan, dengan skala penilaian dari 1 sampai dengan 5. Kuesioner dalam penelitian ini diadaptasi dari (Wilopo, 2006)

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik *survey*, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebar kepada kriteria responden di OPD Kabupaten Kebumen. Kuesioner yang telah diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Peneliti memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode *survey* langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

D. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 2
Variabel Penelitian dan pengukuran variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
1.	Variabel Dependen		
	a. Kecurangan Akuntansi	Kecurangan Akuntansi adalah suatu tindak penipuan terencana dengan melanggar aturan akuntansi, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain (Tunggal, 2013)	Instrumen 9 butir pernyataan dengan indikator kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Diukur dengan menggunakan skala likert 1- 5 Downida, (2017).
2.	Variabel Independen		
	a. Pengendalian Internal	Adelin (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efesiensi, ketaatan	Instrumen 5 butir pernyataan dengan indikator 5 yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Diukur

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan.	dengan menggunakan skala likert 1-5 Downida, (2017)
b.	Ketaatan Aturan Akuntansi	Ketaatan aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban bagi organisasi untuk mematuhi segala aturan akuntansi dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang berkualitas.	Instrumen 7 butir pernyataan dengan indikator mengenai kepentingan publik, integritas, objektivitas, kehati-hatian, kerahasiaan, konsistensi dan standart teknis. Diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 Downida (2017)
c.	Penegakan Hukum	Hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk berfungsinya atau tegaknya norma - norma hukum yang berlaku secara nyata sebagai dasar atau pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asshidiqie, 2009).	Variabel ini diukur dengan 4 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian Zainal (2013) dan diukur dengan skala linker 1-5 indikator yang digunakan adalah. Peraturan organisasi, Disiplin kerja, Pelaksanaan tugas,Tanggung jawab
		Perilaku tidak etis adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum,	Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh penelitian (Zainal, 2013)

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
		sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau yang membahayakan (Ebert, 2006).	dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikatornya yang digunakan yaitu: Perilaku yang menyalahgunakan kedudukan, Perilaku yang menyalahgunakan sumber daya Organisasi, Perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, Perilaku yang tidak berbuat apa apa, Perilaku yang mengabaikan peraturan
	d. Perilaku Tidak Etis		Instrumen 6 butir pernyataan dengan indikator informasi laporan keuangan, hubungan transaksi keuangan, kerahasiaan informasi, dan tanggung jawab informasi. Diukur dengan menggunakan skala likert 1-5 (Downida, 2017)
		merupakan suatu keadaan dimana agen memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya Rahmawati (2012).	Variabel ini diukur dengan 5 item pertanyaan dengan indikator pengukuran yang dikembangkan oleh (komang & lestari, 2017) dan diukur menggunakan skala likert 1-5. Indikatornya yang digunakan yaitu:
	e. Asimetri Informasi	Kompensasi menurut (Rivai, Veithzal dan Sagala, 2010) merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa	

No	Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
	f. Kesesuaian Kompensasi	mereka kepada perusahaan. Kesesuaian kompensasi dimaksudkan bahwa imbalan yang diterima oleh karyawan atas jasa yang diberikannya adalah sesuai dengan pengorbanannya, sehingga imbalan tersebut mampu memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan dan tujuan yang ingin dicapai	Kompensasi finansial, Kompensasi nonfinansial, Mempertahankan karyawan yang ada, Menjamin keadilan

E. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Penelitian juga menggunakan statistik deskriptif yang terdiri dari *mean*, *deviasi standar*, *minimum* dan *maksimum* (Ghozali, 2018b)

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan

diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:57). Menguji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *unidimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor loading yang tinggi.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). *Uji Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan cross loading > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali,

2018:57).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat *reliabilitas* masing-masing instrumen yang digunakan, maka peneliti menggunakan *koefisien cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,70 atau 70% (Ghozali, 2018b).

3. Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*)

Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$KA = \alpha - \beta_1 PI - \beta_2 KAA - \beta_3 PH + \beta_4 PTE + \beta_5 PAI - \beta_6 KK + e$$

Keterangan:

KA	: Kecurangan Akuntansi (<i>Fraud</i>)
α	: Nilai intersep (konstan)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	: Koefisien Regresi
PI	: Pengendalian Internal
AA	: Ketaatan pada Aturan Akuntansi
PH	: Penegakan Hukum
PTE	: Perilaku Tidak Etis
AI	: Asimetri Informasi
KK	: Kesesuaian kompensasi
e	: <i>Error term</i>

a. Uji R^2 (*Koefisien Determinasi*)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018:98). Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua

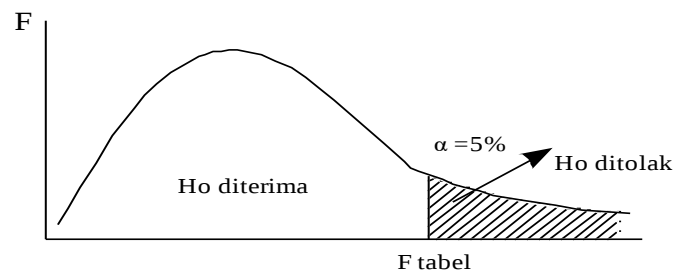
variabel independen yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi, asimetri informasi, dan integritas terhadap variabel dependen yaitu kecurangan akuntansi. Besarnya koefisien 0 sampai 1, semakin mendekati 0 koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018:97)

b. Uji F (*Goodness of Fit*)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*Goodness of Fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fit atau tidak (Ghozali, 2018:97). Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pemilang $df = k$ dan derajat kebebasan penyebut ($df = n - k - 1$) dimana k adalah jumlah variabel bebas. pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

- 1) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
- 2) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$ maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (*tidak fit*).

Perbandingan nilai kritis yang diperoleh ini selanjutnya akan dikonfersikan dengan nilai tabel sesuai dengan ketentuan dalam.



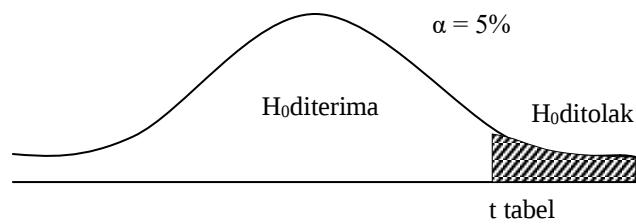
Gambar 2
Penerimaan Uji F

c. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = n-1$ (Ghozali, 2018:98)

1. Hipotesis Positif

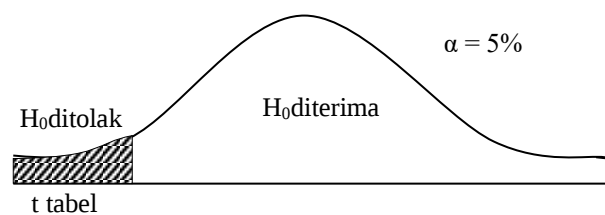
- a) Ho ditolak jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Ho diterima jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3
Penerimaan Hipote

2. Hipotesis Negatif

- a) H_0 ditolak jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} < \alpha = 0,05$, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) H_0 diterima jika $-t \text{ hitung} > -t \text{ tabel}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 4
Penerimaan Hipotesis Negatif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mempermudah OPD di Kabupaten Kebumen dalam mengetahui faktor apa yang mempunyai pengaruh pada pegawai dalam melakukan tindakan kecurangan akuntansi. Sampel yang diambil yaitu OPD Kabupaten Kebumen sebanyak 23 OPD, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 80 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, ketaatan aturan akuntansi terhadap kecurangan akuntansi sebesar 14,1% sedangkan sisanya 85,9% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini.
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji T menunjukkan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, penegakan hukum, ketaatan aturan akuntansi tidak

berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Kebumen.

4. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi. Hasil pengujian menunjukkan perilaku tidak etis sangat berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi yang mungkin timbul pada organisasi, kecurangan akuntansi tinggi akibat dari perilaku tidak etis pada individu yang terlibat didalamnya. Dari hasil pengujian diatas dapat ditarik kesimpulan semakin tinggi perilaku tidak etis semakin tinggi pula tingkat kecurangan yang terjadi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena populasi yang digunakan hanya di Dinas dan Badan sedangkan masih ada organisasi sector publik yang lain seperti Kecamatan sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
2. Pengolahan data pada penelitian ini berdasarkan jawaban dari responden pada kuesioner yang disebar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Serta hasil penelitian ini hanya didasarkan pada data secara tertulis dari kuesioner.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, dimana variabel yang diteliti hanya pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, perilaku tidak etis, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi. Sedangkan

masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kecurangan akuntansi.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan kecamatan, karena kecamatan agar dapat menggeneralisasikan hasil penelitian ini.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat memengaruhi kecurangan akuntansi seperti Komitmen Organisasi. Komitmen organisasi memberikan dampak yang positif untuk mengurangi resiko terjadinya kecurangan akuntansi, dengan komitmen yang kuat maka kecurangan akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2020). *ACFE-Magazine.pdf*.
- Adelin, V. (2013). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KETAATAN ATURAN AKUNTANSI, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang. September.*
- Agarwal, S. and K. R. T. (2001). "Perceived Value: Mediating Role of Perceived Risk,." *Journal of Marketing Theory and Practice*, 9, 1–14.
- Arens, A. A., Elder, J. R., & Beasley, S. M. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Erlangga.
- Asshidiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Raja Grafindo Persada.
- Breda, H. dan Van. (2002). *Teori Akunting*. Iinteraksara.
- Cressey. (1953). *The Internal Auditor as Fraud Buster*. MCB University Press.
- Dan, E., Kecurangan, K., & Serta, A. (2009). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERILAKU TIDAK*. 110.
- Dewi, K., & Ratnadi, N. (2017). Pengaruh pengendalian Internal dan Integrasi pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 917–941.
- Didi, D., & Kusuma, I. C. (2018). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 15(1), 1–20. <https://doi.org/10.21002/jaki.2018.01>
- Downida, A. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada SKPD Kota Kediri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(5).
- Ebert, R. J. . R. W. G. (2006). *"Bisnis", Alih Bahasa Rd. Soemarnagara*. Erlangga.
- Fauwzi, M. G. (2011). (n.d.). *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal , Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas Manajemen Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi*.
- Gayatri, N., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kepuasan Kompensasi, Asimetri Informasi, Sistem Pengendalian Internal Terhadap

- Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (fraud) dalam Organisasi (Studi Empiris pada Organisasi Sektor Publik di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi*, 8(2).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018a). No Title. In *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (p. 57). BPFE.
- Ghozali, I. (2018b). No Title. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2012). *Teori Organisasi*. Salemba Empat.
- Harry Krishna Mulia, M., Febrianto, R., & Kartika, R. (2017). Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal terhadap Kecurangan: Sebuah Studi Eksperimental. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 198–208. <https://doi.org/10.18196/jai.180283>
- Indonesia Corruption Watch. (2018). [Www.Antikorupsi.Org](http://www.Antikorupsi.Org).
- Indriantoro, Nur, dan B. S. (1999). *Metodologi Penelitian dan Bisnis*. BPFE Yogyakarta.
- Komang, N., & Lestari, L. (2017). INFORMASI PADA KECURANGAN AKUNTANSI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK PENDAHULUAN Pemerintahan yang baik (good governance) merupa. 21, 389–417.
- Martoyo, S. (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (2nd ed.). BPFE.
- Mathis, & Jackson. (2006). *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2002). No Title. In *Auditing*. Salemba Empat.
- Najahningrum, A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud): Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY*.
- Novikasari, Y., Desmiyawati, D., & Silfi, A. (2016). PENGARUH MORALITAS INDIVIDU, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Empiris pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1516–1530.

PP nomer 71 tahun, (2010).

PP RI No. 24 tahun 2005.

Rahmawati. (2012). *Teori Akutansi Keuangan*. Graha Ilmu.

Ramaidha, R. (2016). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan kepuasan kerja terhadap kecurangan akuntansi. *Pengaruh Keefektifan Pengendalian*, 1, 1–14.

Rivai, Veithzal dan Sagala, E. J. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. PT Raja Grafindo.

Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Penegakan Hukum, Dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 10–20. <https://doi.org/E-ISSN 2581-1002>

Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 1–11.

Setiawan, M. D., Adi, I. M., Adiputra, P., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Asimetri Informasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 3(1), 1–8.

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sukandamurnidi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Pers UGM.

Tarigan, L. B. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi(Studi pada BUMD Provinsi Riau). *JOM Fekom*, 3, 896–909.

Tunggal, A. W. (2013). *Corporate Fraud and Internal Control*. Harvarindo.

UU No.254 Tahun 1960.

Velasquez, M. G. (2005). *Etika Bisnis : Konsep dan Kasus* (Ana Purwanindan Totok Budi Santoso (Ed.); 5th ed.). Penerbit Andi.

Wilopo. (2006). *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. The Indonesian Journal of Accounting Research (IJAR).

- Yuliani, N. L., & Rahistiana, F. (2018). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (FRAUD) (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)*. 15–30.
- Zainal, R. (2013). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, asimetri informasi Dan kesesuaian kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *Universitas Negeri Padang*, 1–25.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). *Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud*. 8(10), 67–76.
- Zhu, C., Chen, L., Ou, L., Geng, Q., Jiang, W., Lv, X., Wu, X., Ci, H., Liu, Q., Yao, Y., Pentadbiran, P., Persekutuan, K., Kami, R., Ketua, S., Kementerian, S., Persekutuan, J., Pentadbiran, S., Kerajaan, S., Berkanun, B., ... Flynn, D. (2019).